



Konferensi Pers

Konferensi FiTI di Bali tandai awal baru era transparansi di dunia perikanan

Bali – 27 April 2017. *The 2nd International Conference of the Fisheries Transparency Initiative (FiTI)* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia telah menandai dimulainya era baru transparansi dan partisipasi di dunia perikanan. Atas undangan Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, lebih dari 200 peserta berkumpul di Bali dan sepakat untuk melahirkan sebuah standar internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan yang terbuka dan akuntabel.

Sebagai hasil dari diskusi komprehensif yang berlangsung selama dua tahun dengan para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, usaha perikanan dan lembaga masyarakat, Standar FiTI memberikan pedoman mengenai informasi apa saja yang perlu dipublikasikan oleh negara dalam rangka mengatasi permasalahan terkait pengelolaan sumberdaya berkelanjutan, yang notabene merupakan sumber yang sangat penting bagi mata pencaharian, makanan dan perdagangan untuk jutaan orang di seluruh dunia.

Terbitnya Standar FiTI menandai permulaan fase implementasi dari inisiatif ini, dimana negara-negara yang ingin bergabung dalam FiTI dapat meningkatkan transparansi dan partisipasinya di dalam tata kelola perikanan untuk mencapai pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. “Indonesia menyambut dengan baik penyelenggaraan konferensi ini, yang juga menandai tahap baru dari *Fisheries Transparency Initiative (FiTI)*. Pada dasarnya, Indonesia mendukung inisiatif yang baik ini. Dengan garis pantai lebih dari 80,000 kilometer dan merupakan yang terpanjang kedua di dunia, pemerintah Indonesia mendukung masyarakat pesisir untuk melindungi ekosistem lautnya. Oleh karena itu, informasi terpadu mengenai siapa yang menangkap apa di perairan kita akan sangat membantu usaha Indonesia dalam memerangi segala bentuk *IUU fishing* dan tindak pidana di bidang perikanan”, ujar Menteri Susi Pudjiastuti.

Bersama dengan Indonesia, empat negara percontohan lainnya, yaitu Mauritania, Senegal, Seychelles, dan Guinea telah mulai meletakkan dasar untuk melaksanakan proses inisiatif ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang berlaku di masing-masing negara. Para perwakilan dari negara-negara ini telah mencapai kemajuan dalam menyiapkan pelaksanaan FiTI dan telah menyampaikan kembali komitmennya untuk menjalankan prinsip transparansi di dunia perikanan.

Transisi FiTI yang sebelumnya berada pada fase perancangan menjadi fase pelaksanaan ditandai dengan disampaikannya kesediaan Pemerintah Seychelles untuk menjadi tuan rumah dari Sekretariat Internasional FiTI oleh Menteri Pertanian dan Perikanan Seychelles, Michael Benstrong.

Konferensi ini juga bertujuan untuk menyambut pembentukan *International Board* pertama sebagai badan eksekutif global FiTI, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil. *FiTI International Board* yang dipimpin oleh Prof. Dr. Peter Eigen akan mengawasi proses pelaksanaan FiTI. “Informasi dasar pada sektor perikanan seringkali masih berada di luar ranah publik. Tanpa informasi tersebut, kualitas dan kredibilitas pengambilan keputusan menjadi kurang. Hari ini kita menandai tonggak utama perubahan. Dengan *FiTI Standard*, kami memberikan suatu jalan yang komprehensif dan kredibel kepada pemerintah, industri perikanan (baik skala besar maupun skala kecil), dan masyarakat sipil untuk mencapai dan mempertahankan tingkat transparansi yang tinggi pada pengelolaan sektor perikanan dan kelautan, serta kegiatan nelayan dan perusahaan perikanan. Hal ini datang di waktu yang sangat penting, dimana kita semua harus bekerja sama untuk melestarikan dan memelihara sumber daya samudera, laut, dan bahari,” kata Prof. Dr. Peter Eigen.